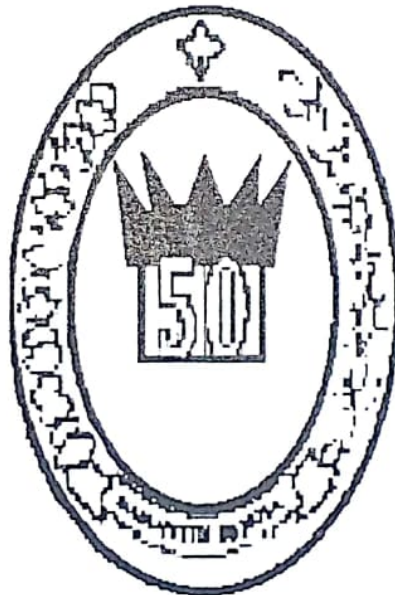


**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. PAHLAWAN NO. 14 PAYAKUMBUH, TELP. 0752-92049 FAX.0752-91094

## DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN .....	I-1
		1.1 Latar Belakang .....	I-1
		1.2 Landasan Hukum .....	I-2
		1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-4
		1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	II-1
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAHEWAN	II-1
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disnak & Keswan .....	II-12
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disnak & Keswan.....	II-16
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-16
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	II-25
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-1
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-1
		3.2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
		3.2.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.....	III-3
		3.2.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-3
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .....	III-4
		3.2.1. Telaahan terhadap Renstra DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .....	III-5
		3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnak&Keswan Tahun 2018.....	III-9
		3.3 Program dan Kegiatan .....	III-11
BAB IV	:	PENUTUP .....	IV-1

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari



tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini ditujukan untuk :

1. Memberi arah dan mendorong seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar memiliki semangat dan kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasan dan evaluasi.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018.

## 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi.

### BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan



capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, meskipun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

### 3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

## **BAB IV. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindaklanjut

## EVALUASI KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 (Tahun lalu) dan Capaian Renstra

Memperhatikan tabel C1 yakni tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s.d tahun 2017 (tahun berjalan), maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. mempedomani target renja tahun 2017 dan hasil/keluarannya maka ada kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan. Secara umum dapat dilihat bahwa realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Perkiraan capaian kinerja s.d tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. (C1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s.d tahun 2017 (tahun berjalan).



**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017**  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Nomor Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (OutPut)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Ketahanan Pangan</b>									
1 21 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1 21 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1 21 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya penerangan, air bersih & lancarnya komunikasi dinas	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1 21 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium kegiatan dinas	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1 21 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		

1		2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	21	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1	21	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kelengkapan adm dinas	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1	21	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1	21	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu dinas	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1	21	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi serta perjalanan dinas ke luar daerah dengan lancar	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1	21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	21	02	04	Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya mobil untuk kepala dinas yang menunjang operasional tugas sehari-hari	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100.000	1 unit	1 unit	
1	21	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional mobil operasional	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	12 bulan	
1	21	02	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terealisasinya Rehab gedung kantor	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	12 bulan	
1	21	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
1	21	03	05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian dan perlengkapannya	71 stel	449 stel	160 stel	71 stel	44.37			
1	21	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	21	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana pelatihan aparatur	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	12 bulan	
1	21	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan									



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
1	16 03	Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani	50 kelompok	100 kelompok	50 kelompok	50 kelompok	100.00	50 kelompok		
1	16 03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani								
1	16 03	Urusan Pertanian								
2	01 21	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak								
2	01 21 01	Pendataan Masalah Peternakan	5 PHMS	25 PHMS	5 PHMS	5 PHMS	100.00	5 PHMS		
		Tertaksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dhi								
		Tertaksananya pendataan dan pembinaan toko obat hewan dan termonitornya obat hewan yang beredar	50 toko obat hewan	250 toko obat hewan	50 toko obat hewan	50 toko obat hewan	100.00	50 toko obat hewan		
		Tersedianya buku statistik peternakan dan data penyakit hewan menular	50 buku statistik	250 buku statistik	50 buku statistik	50 buku statistik	100.00	50 buku statistik		
2	01 21 02	Pemeliharaan kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	10000 dosis	50000 dosis	10000 dosis	10000 dosis	100.00	10000 dosis		
		Tertaksananya vaksinasi rabies	2200 dosis	11000 dosis	2200 dosis	2200 dosis	100.00	22000 dosis		
		Tertaksananya vaksinasi SE								
		Tertaksananya pengendalian dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
		Tertaksananya sosialisasi penyakit hewan Menular (PHM) terutama Rabies, AI, SE dan IBR	20 nagari	100 nagari	20 nagari	20 nagari	100.00	20 nagari		
2	01 21 03	Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	5.000 ekor	25.000 ekor	5.000 ekor	5.000 ekor	100.00	5.000 ekor		
		Tertaksananya pemusnahan/hewan terjangkit penyakit menular Rabies dan AI								



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01	04	21	04	Pengawasan Perdagangan Temak Antar Daerah	Terlaksananya sosialisasi pemolongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelarangan pemolongan hewan betina	13 Kecamatan	13 kecamatan		
					Terlaksananya pemolongan hewan di TPH, hari besar agama (Idul Fitri dan Idul Adha)	6 TPH	100.00	6 TPH		
					Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan	5 Farm	100.00	5 Farm		
2	01	22	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
2	01	22	01	22	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Temak	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan IB dan Reproduksi TE pada seluruh Pos IB di Kabupaten Lima Puluh Kota	12000 dosis	12000 dosis		
					Terlaksananya IB dan TE	6000 dosis	100.00	6000 dosis		
					Terlaksananya monitoring dan evaluasi	50 ekor	100.00	50 ekor		
					Terlaksananya pemantauan kebuntingan temak yang sudah di IB	12 bulan	100.00	12 bulan		
2	01	22	02	02	Pembibitan Dan Perawatan Temak	Meningkatnya populasi temak dari hasil IB	3000 ekor	3000 ekor		
					Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi IB dan TE	60000 ekor	100.00	3000 ekor		
					Terlaksananya pengadaan temak dan pendistribusiannya untuk kelompok tani di Kabupaten Lima Puluh Kota	60 bulan	100.00	12 bulan		
2	01	22	03	03	Pendistribusian Bibit Temak Kepada Masyarakat	Terlaksananya pembinaan monitoring evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit temak kepada masyarakat	125 ekor	100.00	25 ekor	
						60 bulan	100.00	12 bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01 22 05	Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak	12 kelompok	60 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	100.00	12 kelompok		
		Tertaksananya kegiatan pengolahan pakan ternak alternatif pada kelompok tani	15 ekor	75 ekor	15 ekor	15 ekor	100.00	15 ekor		
		Tertaksananya kegiatan percobaan pakan konsentrat sapi potong pada kelompok tani	50 buku	250 buku	50 buku	50 buku	100.00	50 buku		
		Tersedianya bahan penyuluhan (buku) tentang pakan dan gizi ternak	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
		Tertaksananya pembinaan dan monitoring tentang gizi dan pakan ternak	10000 dosis	50000 dosis	10000 dosis	10000 dosis	100.00	10000 dosis		
2	01 22 06	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	10000 dosis	50000 dosis	10000 dosis	10000 dosis	100.00	10000 dosis		
		Tersedianya vaksin anti rabies untuk petugas kesehatan hewan	1 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100.00	1 paket		
		Tersedianya sarana dan prasarana untuk vaksinasi, eliminasi dan surveillance	-	-	-	-	-	250 plang register		
2	01 22 08	Pengembangan agribisnis peternakan	30 orang	150 orang	30 orang	30 orang	100.00	30 orang		
		Meningkatnya pengetahuan peternak dan pengolah hasil	-	-	-	-	-	5 investor		
		Tertaksananya kerjasama dengan pihak ketiga/investor untuk menanamkan modal pengembangan ternak sapi di Kab. LPK	-	-	-	-	-	-		
2	01 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan								
2	01 23 01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	4 paket	-	-	-	-	-		
		Terciptanya inovasi, teknologi serta peluang dan akses baru untuk pemasaran hasil produksi peternakan								



1		2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01	23	02	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/ internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer	Terjalin kesepakatan kerjasama di bidang penyediaan hasil produksi peternakan antara peternak/kelompok dengan pengusaha baik regional maupun nasional	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
2	01	23	03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Terlaksananya pembangunan pasar produksi hasil peternakan beserta sarana dan prasarana penunjang	-	-	-	-	-	1 unit	-	-
2	01	23	04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibisi/promosi atas hasil produksi peternakan	Terlaksananya pembangunan pusat-pusat promosi dan pemasaran hasil produksi peternakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	01	23	05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan	Terpelihara dan terawat fasilitas/aset yang ada dipasar ternak	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100.00	2 lokasi	2 lokasi	-
2	01	23	06	Pemeliharaan rutin/berkala pusat etalase/eksibisi/promosi	Meningkatnya aktifitas transaksi di pasar ternak	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	01	23	07	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan	1 kali	5 kali	1 kali	1 kali	100.00	1 kali	1 kali	-
2	01	23	08	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahan peternakan melalui expo peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat	1 kali	5 kali	1 kali	1 kali	100.00	1 kali	1 kali	-
2	01	23	08	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Bertambahnya jaringan pemasaran produk olahan peternakan	-	-	-	-	-	-	2 kali	-
					Terselenggaranya sosialisasi/pemasaran hasil peternakan dan olahannya kepada peternak dan pengolah hasil								



1		2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01	23	09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	2	Terfaksananya pembanguna pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat		-	-	-	-	-	-
2	01	23	10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	2	Pengolahan informasi komoditi peternakan dan produk olahan hasil peternakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		
2	01	23	11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	2	Tersedianya informasi pasar utk komoditi peternakan yang dapat diakses oleh produsen dan konsumen		-	-	-	2 kali		
2.01	01	23	12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan masyarakat	2	Meningkatnya SDM pelaku pengolah hasil peternakan	2 kali	-	-	-	-		
						Terjaminnya kualitas kemasan produk olahan hasil peternakan							
						Menariknya kemasan rodud olahan hasil peternakan							
						Meningkatnya keinginan konsumen untuk membeli produk olahan hasil peternakan							
2	01	23	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2	Terfaksananya monav dan pelaporan kegiatan APBD, APBN sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran	12 bulan	60 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan		

1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 p.i.g	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Paternakan									
2.01	01	24	01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya pengembangan teknologi peternakan tepat guna								
2	01	24	02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin (Alsin) peternakan	4 paket	20 paket	4 paket	4 paket	100.00	4 paket		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan tolok ukur dan indikator kinerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan lebih jauh kedalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penetapan Tolok Ukur dan Indikator Kinerja tersebut terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan dengan tabel C2 yang berisikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.



**TABEL C. 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra SKPD				Realisasi capaian				Cat. Analisis
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teriaksananya promosi hasil peternakan dan produk olahan hasil peternakan</li> <li>2. Teriaksananya promosi produk hasil peternakan melalui media massa</li> <li>3. Teriaksananya promosi produk hasil peternakan melalui leaflet</li> <li>4. Meningkatnya pembinaan teknis usaha peternakan kepada pelaku pengolahan hasil peternakan</li> </ol>	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
			-	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	
			-	-	-	-	-	-	1 rim	1 rim	
			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
		Teriaksananya pembinaan kelompok pengolahan hasil					10 klp	5 klp	30 klp	30 klp	
		Teriaksananya study lapangan/study banding					5 org	30 org	10 org	15 orang	
		5. Terwujudnya pembangunan pusat-pusat etalase/ eksibisi/promosi atas produk olahan peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6. Terfasilitasinya pengembangan teknologi pengolahan hasil peternakan	-	2 unit	1 unit		2 unit	1 unit	2 unit	4 unit	
		Meningkatnya kredit peternakan yang direalisasi oleh bank berdasarkan rekomendasi usaha peternakan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		30 rek	70 rek	65 rek	65 rek	



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		g. Tissue gulung / gulung						150 gulung	50 gulung	100 gulung	
		2. Realisasi IB (I, II, III) / straw	-	-	-	-	14.829 ekor		14.900 ekor	15.000 ekor	
		a. IB I						7.918 straw	12.173 ekor	12.000 ekor	
		b. IB II						1.337 straw	2.303 ekor	2.000 ekor	
		c. IB III						236 straw	424 ekor	400 ekor	
		3. Angka Kebuntingan / Ekor	1000 ekor	10.000 ekor	10.000 ekor		1.325 ekor	2.050 ekor	5.000 ekor	7.000 ekor	
		4. Angka kelahiran anak hasil IB / ekor	1000 ekor	10.000 ekor	10.000 ekor		4.544 ekor	2.995 ekor	8.000 ekor	8.000 ekor	
		5. Jumlah kelompok yang mengeloa ketersediaan bahan pakan lokal untuk menunjang produksi ternak.	-	-	-		3 klp	13 klp	8 klp	8 klp	
		6. Jumlah pemenuhan bahan pakan ternak yang beredar	-	-	-		18 sampel	10 sampel	10 sampel	10 sampel	
		7. Pendistribusian ternak pada masyarakat / kelompok	-	-	-		26 klp	21 klp	7 klp	5 klp	
3.	Berkurangnya permasalahan penyakit	Tingkat pendeteksian penyakit hewan secara dini	1.500 ekor	1.500 ekor	1.500 ekor		0	100 ekor	250 ekor	150 ekor	
	menular dan penyakit yang disebabkan	Tingkat pengawasan obat hewan pada Depo / toko obat hewan	3 cek	3 cek	3 cek		37 depo	14 depo	30 toko/depo	30 toko/depo	
	kan oleh hewan liar dan ternak	Tingkat kualitas pelayanan kesehatan hewan / tingkat SDM aparatur	10 orang	10 orang	10 orang		22 orang	24 orang	24 petugas	22 petugas	
		Tingkat penurunan kasus penyakit menular dan penyakit yang disebabkan oleh hewan liar dan ternak (zoonosis)	3.000 ekor	3.000 ekor	3.000 ekor		6 kasus	5 kasus	5 penyakit	30 penyakit	
		5. Tingkat pengawasan perdagangan hewan / ternak antar daerah dan pemotongan hewan	3 cek	3 cek	3 cek		6 TPH, 2 HR, 20 smpel	5 TPH, 2 HR, 20 smpel	2 TPH, 2 hr raya, 1 cek point	6 TPH, 2 hr raya	
		6. Jumlah dan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan.	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	-	6 UPT	6 UPT	
		7. Tingkat pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik.	2.000 ekor	2.000 ekor	2.000 ekor		609 ekor	2.000 ekor	500 ekor	1.000 ekor	



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

#### A. Tingkat Kinerja pelayanan SKPD dan hal-hal Kritis terkait pelayanan SKPD

Memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2016 sebagaimana yang tertuang pada LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

#### B. Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terhadap pencapaian target kegiatan dan program.

#### C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

#### D. Isu-isu penting dan prioritas yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2018

Adapun isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.
2. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
3. Peningkatan produksi hasil peternakan, hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak, Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
4. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 berikut :



Tabel C3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017  
Kabupaten Lima Puluh Kota

DINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN

lembar ... dari....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p><i>Urusan Ketahanan Pangan</i></p> <p>Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>									
	Keg: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnak Keswan	Terlaksananya surat menyurat dengan baik : - Material 6000 dan 3000 - Amplop - Lembar Disposisi - Jasa Pengiriman	12 bulan	11.300	Keg: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnak Keswan	Terlaksananya surat menyurat dengan baik : - Material 6000 dan 3000 - Amplop - Lembar Disposisi - Jasa Pengiriman	12 bulan	12.500
	Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnak Keswan & UPT	Terlayannya rekening telepon, koran, listrik, air dan internet dinas dan UPT	12 bulan	135.250	Keg: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnak Keswan & UPT	Terlayannya rekening telepon, koran, listrik, air dan internet dinas dan UPT	12 bulan	150.000
	Keg: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Disnak Keswan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan untuk 20 orang	12 bulan	210.540	Keg: Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Disnak Keswan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan untuk 20 orang	12 bulan	250.000
	Keg: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disnak Keswan & UPT	Tersedianya alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	12 bulan	21.835	Keg: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disnak Keswan & UPT	Tersedianya alat dan bahan kebersihan dinas dan UPT	12 bulan	25.000
	Keg: Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disnak Keswan & UPT	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	12 bulan	89.096	Keg: Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disnak Keswan & UPT	Tersedianya alat tulis dinas dan UPT	12 bulan	98.000
	Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Disnak Keswan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kelengkapan adm dinas	12 bulan	17.725	Keg: Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Disnak Keswan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kelengkapan adm dinas	12 bulan	20.000
	Keg: Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Disnak Keswan & UPT	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk dinas dan UPT	1 paket	141.175	Keg: Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Disnak Keswan & UPT	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk dinas dan UPT	1 paket	165.000
	Keg: Penyediaan Makanan dan Minuman	Disnak Keswan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	18.350	Keg: Penyediaan Makanan dan Minuman	Disnak Keswan	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 bulan	22.000
	Keg: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disnak Keswan	Terlaksananya koordinasi kegiatan dinas dan UPT serta terlaksana kegiatan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	254.848	Keg: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disnak Keswan	Terlaksananya koordinasi kegiatan dinas dan UPT serta terlaksana konsultasi ke luar daerah	12 bulan	270.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				974.955	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
	Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Disnak Keswa	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk menunjang operasional tugas sehari-hari	2 unit	706.455	Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Disnak Keswa	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk menunjang operasional tugas sehari-hari			
	Keg : Pemeliharaan Rulin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Disnak Keswan	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	12 bulan	224.500	Keg : Pemeliharaan Rulin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Disnak Keswan	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dinas dan UPT	12 bulan	250.000	
	Keg:Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	UPT	Tertaksananya rehab kantor UPT	4 unit	44.000	Keg:Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	UPT	Tertaksananya rehab kantor UPT	unit	51.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				50.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Keg: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Peralengkapannya	Disnak Keswan	Terpenuhiya kebutuhan pakaian dinas harian beserta atributnya untuk pegawai dinas dan UPT	94 stel	50.000	Keg: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Peralengkapannya	Disnak Keswan	Terpenuhiya kebutuhan pakaian dinas harian beserta atributnya untuk pegawai dinas dan UPT			
	Prog Pening. Kapasitas Sumber Daya Aparatur				21.765	Prog Pening. Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000	
	Keg: Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Disnak Keswan	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	12 bulan	21.765	Keg: Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Disnak Keswan	Terwujudnya peningkatan SDM aparatur		25.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Cepalan Kinerja Dan Keuangan				112.865	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Cepalan Kinerja Dan Keuangan				130.000	
	Keg : Penyusunan Laporan Cepalan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnak Keswan & UPT	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicek dan digandakan seperti : DPA, LKIP, RENJA, LAP MONEY, LAP, TAH, LAP, KEU dll	12 bulan	112.865	Keg : Penyusunan Laporan Cepalan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnak Keswan & UPT	Tersedianya laporan dan dokumen yang sudah dicek dan digandakan seperti : DPA, LKIP, RENJA, LAP MONEY, LAP, TAH, LAP, KEU dll	12 bulan	130.000	
			Monev kelompok penerima bantuan dari pemerintah								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB					
	KETAHANAN PANGAN					KETAHANAN PANGAN					
	Prog Peningkatan Kesejahteraan Petani				106.878	Prog Peningkatan Kesejahteraan Petani					
	Keg : Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pemberdayaan kelompok	75 kelompok	106.878	Keg : Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pemberdayaan kelompok	75 kelompok	150.000	
	URUSAN PILIHAN					URUSAN PILIHAN					
	PERTANIAN					PERTANIAN					
	Prog Pencegahan & Penanggulangan Peny. Ternak				692.374	Prog Pencegahan & Penanggulangan Peny. Ternak				2.175.000	
	Keg. Pendataan Masalah Peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini	5 PHMS	235.673	Keg. Pendataan Masalah Peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pemantauan, pendeteksian, pendataan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis secara dini	5 PHMS	250.000	
		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat dan Hewan dan Termonitornya obat hewan yang beredar di 8 kecamatan	20 toko obat hewan			Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pendataan dan pembinaan Toko Obat dan Hewan dan Termonitornya obat hewan yang beredar di 8 kecamatan	20 toko obat hewan		
		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelaporan yang profesional	6 UPT			Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelaporan yang profesional	6 UPT		
		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya Pembinaan Puskesmas	6 Puskesmas			Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya Pembinaan Puskesmas	6 Puskesmas		
		Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan SDM petugas Kewan dan Kesmavet	30 petugas			Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan SDM petugas Kewan dan Kesmavet	30 petugas		
	Keg. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya Vaksinasi Rabies	10.000 dosis	323.236	Keg. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya Vaksinasi Rabies	10.000 dosis	1.550.000	
		Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	Teraksananya Vaksinasi SE	1000 dosis			Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX	Teraksananya Vaksinasi SE	1000 dosis		
		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya sosialisasi penyakit hewan menular (PHM) terutama Rabies, AI, SE dan IBR	2 Lak			Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya sosialisasi penyakit hewan menular (PHM) terutama Rabies, AI, SE dan IBR	2 Lak		
		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya penanggulangan gangguan reproduksi	500 ekor			Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya penanggulangan gangguan reproduksi	500 ekor		
		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya penanggulangan kasus gigitan HPR	50 ekor			Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya penanggulangan kasus gigitan HPR	50 ekor		
		Kab. Lima Puluh Kota	Koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	4 kali			Kab. Lima Puluh Kota	Koordinasi dalam penanganan dan pengendalian PHMS	4 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				107.606	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				150.000	
	Keg. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terfaksananya penilaian angka kredit penyuluhan dan beroperasinya sistem informasi Penyuluh pertanian (SIMLUH)	20 orang	107.605		Kabupaten Lima Puluh Kota	Terfaksananya penilaian angka kredit penyuluhan dan beroperasinya sistem informasi Penyuluh pertanian (SIMLUH)	20 orang	150.000	
			Terfaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat					Terfaksananya Temu Teknis / Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Penyuluh untuk temu teknis tingkat provinsi dan pusat			
			Terfaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh					Terfaksananya monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh untuk peningkatan kapasitas kinerja penyuluh			
	JUMLAH				6.643.859					8.106.500	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				606.738	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				660.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Pasar Temak Limbanang Kec. Suliki & Pasar Temak Padang Siontah Kec. Siuljuh	Tertaksananya pemeliharaan pasar temak	2 unit	152.000	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Pasar Temak Limbanang Kec. Suliki & Pasar Temak Padang Siontah Kec. Siuljuh	Tertaksananya pemeliharaan pasar temak	2 unit	160.000	
	Keg.Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Kabupaten/kota lain, IKK Sarilamak	Tertaksananya hasil peternakan dan produk olahannya hasil peternakan	2 kali pameran dan 1 kali lomba temak	226.195	Keg.Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahannya hasil peternakan	2 kali pameran dan 1 kali lomba temak	250.000	
		Kab. Lima Puluh Kota	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahannya peternakan melalui Expo peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat	1 kali			Kab. Lima Puluh Kota	Terpromosikannya hasil peternakan dan produk olahannya peternakan melalui Expo peternakan tingkat provinsi Sumatera Barat	1 kali		
		Kab. Lima Puluh Kota	Bertambahnya jaringan pemasaran produk olahannya hasil peternakan				Kab. Lima Puluh Kota	Bertambahnya jaringan pemasaran produk olahannya hasil peternakan			
	Keg. Peningkatan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tertaksananya pemantauan informasi permintaan pasar	3 komoditi temak, 30 PS	228.543		Kabupaten Lima Puluh Kota	Teraksananya pemantauan informasi permintaan pasar	3 komoditi temak, 30 PS	250.000	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				602.732	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				693.000	
	Keg.Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	Tertaksananya pengadaan mesin chooper penghancur kompos dan pemotong rumput di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tertaksananya CPCL	Tersedianya alat mesin peternakan, 2 unit mesin chooper pengolah kompos dan 2 unit mesin chooper pemotong rumput dan 4 unit bentor.	342.285	Keg.Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pengadaan mesin chooper penghancur kompos dan pemotong rumput di Kabupaten Lima Puluh Kota dan tertaksananya CPCL	Tersedianya alat mesin peternakan, 2 unit mesin chooper pengolah kompos dan 2 unit mesin chooper pemotong rumput dan 4 unit bentor.	393.000	
	Keg. Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	Tertaksananya penyuluhan penerapan teknologi tepat guna kepada kelompok lain/temak	200 kelompok	260.450		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya penyuluhan penerapan teknologi tepat guna kepada kelompok lain/temak	200 kelompok	300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelompok tani temak di Kabupaten Lima Puluh Kota	Teraksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit temak kepada masyarakat dan keg. Lainnya di bid. Prod.	12 bulan			Kelompok tani temak di Kabupaten Lima Puluh Kota	Teraksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi dan CPCL kegiatan penyebaran bibit temak kepada masyarakat dan keg. Lainnya di bid. Prod.	12 bulan		
	Keg. Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Temak	10 kelompok	Teraksananya kegiatan pengolahan pakan temak alternatif pada kelompok tani	12 kelompok	199.343	Keg. Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Temak	10 kelompok	Teraksananya kegiatan pengolahan pakan temak alternatif pada kelompok tani	12 kelompok	270.000	
		Kelompok tani temak di Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya kegiatan percobaan pakan konsentrat sapi potong pada kelompok	20 ekor			Kelompok tani temak di Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya kegiatan percobaan pakan konsentrat sapi potong pada kelompok	20 ekor		
		Kelompok Tani Temak	Tersedianya bahan penyuluhan (buku) tentang gizi dan pakan temak	50 buku			Kelompok Tani Temak	Tersedianya bahan penyuluhan (buku) tentang gizi dan pakan temak	50 buku		
		Kelompok tani temak	Teraksananya pembinaan dan monitoring tig pakan temak serta kegiatan lainnya di bid. Prod.	12 bulan			Kelompok tani temak	Teraksananya pembinaan dan monitoring tig pakan temak serta kegiatan lainnya di bid. Prod.	12 bulan		
	Keg. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Temak	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin anti rabies untuk pelugas kesehatan hewan	10 paket	56.435	Keg. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Temak	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin anti rabies untuk pelugas kesehatan hewan	10 paket	150.000	
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin rabies dan SE	SE 1000 dan Jembrana 1000 serta rabies 10000 dosis			Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya vaksin rabies dan SE	SE 1000 dan Jembrana 1000 serta rabies 10000 dosis		
		Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya sarana dan prasarana untuk vaksinasi, eliminasi dan surveillance	1 paket			Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya sarana dan prasarana untuk vaksinasi, eliminasi dan surveillance	1 paket		
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Teristrasinya kandang temak besar dan unggas	225 kandang	189.430	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Kab. Lima Puluh Kota	Teristrasinya kandang temak besar dan unggas	225 kandang	190.000	
		Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya pengetahuan peternak dan pelaku pengolahan hasil	40 pelaku usaha			Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya pengetahuan peternak dan pelaku pengolahan hasil	40 pelaku usaha		
		Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap peternak, kelompok temak yang mendapat bantuan	20 kelompok			Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap peternak, kelompok temak yang mendapat bantuan	20 kelompok		
		Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	2 rim/leaflet				Tersosialisasinya izin usaha peternakan dan dampak usaha peternakan unggas	2 rim/leaflet		
	Keg. Penyuluhan pengelolaan bibit temak yang didistribusikan kepada masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Teraksananya penyuluhan kepada kelompok temak yang dibetah diberikan bantuan/hibah temak	75 kelompok	209.536			Teraksananya penyuluhan kepada kelompok temak yang dibetah diberikan bantuan/hibah temak	75 kelompok	250.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keg. Pemusnahan Temak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	6 UPT/13 Kecamatan	Teraksananya pemusnahan temak / hewan terjangkit penyakit menular rabies dan AI	300 ekor HPR	22.155	Keg. Pemusnahan Temak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	6 UPT/13 Kecamatan	Teraksananya pemusnahan temak / hewan terjangkit penyakit menular rabies dan AI	300 ekor HPR	175.000	
	Keg. Pengawasan Perdagangan Temak Antar Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelatihan pemotongan hewan belina produktif	13 Kecamatan	110.310	Keg. Pengawasan Perdagangan Temak Antar Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya sosialisasi pemotongan hewan, bahan pangan asal hewan yang ASUH dan pelatihan pemotongan hewan belina produktif	13 Kecamatan	200.000	
		Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pengawasan pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri, dan Idul Adha)	13 kecamatan / 6 TPH			Kab. Lima Puluh Kota	Teraksananya pengawasan* pemotongan hewan di TPH, Hari Besar Agama (Idul Fitri, dan Idul Adha)	13 kecamatan / 6 TPH		
		Kab. Lima Puluh Kota	Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	5 Farm			Kab. Lima Puluh Kota	Pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan (telur)	5 Farm		
		Kab. Lima Puluh Kota	Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur dan Olahannya)	5 pasar tradisional			Kab. Lima Puluh Kota	Pengawasan Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur dan Olahannya)	5 pasar tradisional		
		Kab. Lima Puluh Kota	Pembinaan Farm (Peternakan ayam komersial) untuk NKV	5 Farm			Kab. Lima Puluh Kota	Pembinaan Farm (Peternakan ayam komersial) untuk NKV	5 Farm		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				2.467.827	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				2.810.000	
	Keg. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Temak	13 Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan IB dan Reproduksi TE pada seluruh Pos IB di Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	937.685	Keg. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Temak	13 Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan IB dan Reproduksi TE pada seluruh Pos IB di Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	1.000.000	
		13 Kecamatan	Teraksananya IB dan TE	IB 10.000 dosis			13 Kecamatan	Teraksananya IB dan TE	IB 10.000 dosis		
		13 Kecamatan	Teraksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IB dan ET serta kegiatan lainnya di Bid. Produksi	TE 50 ekor			13 Kecamatan	Teraksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IB dan ET serta kegiatan lainnya di Bid. Produksi	TE 50 ekor		
	Keg. Pembibitan Dan Perawatan Temak	13 Kecamatan	Teraksananya pemeriksaan kebuntingan temak yang sudah di IB	5.000 ekor	212.208	Keg. Pembibitan Dan Perawatan Temak	13 Kecamatan	Teraksananya pemeriksaan kebuntingan temak yang sudah di IB	5.000 ekor	250.000	
		13 Kecamatan	Meningkatnya populasi temak dari hasil IB dan TE	5.000 ekor			13 Kecamatan	Meningkatnya populasi temak dari hasil IB dan TE	5.000 ekor		
	Keg. Pendistribusian Bibit Temak Kepada Masyarakat	Kelompok Tani temak di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL	Teraksananya pengadaan temak dan pendistribusiannya untuk kelompok tani temak di Kab. Lima Puluh Kota	30 ekor sapi dan 500 ekor lik	663.190	Keg. Pendistribusian Bibit Temak Kepada Masyarakat	Kelompok Tani temak di Kab. Lima Puluh Kota melalui proses seleksi hasil CPCL	Teraksananya pengadaan temak dan pendistribusiannya untuk kelompok tani temak di Kab. Lima Puluh Kota	40 ekor	700.000	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2017 serta mempertimbangkan kegiatan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan bagi masyarakat umumnya akan menjadi perhatian serius Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Adapun program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi maupun pemerintah nagari yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang nagari dan kecamatan. Kesemuanya itu ditampilkan pada Tabel C4 yang berisikan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018.

Tabel C4 : Usulan Program dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018  
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO)	Pebangunan rumah pengolahan pupuk organik	Kel. Berkah Bersama	Kelompok	4 kelompok	400,000,000
		Kel. Pemuda Setia			
		Kel. Lakuak Dama			
		Kel. Al Ihsan			
Pengembangan perbibitan dan produksi sapi perah	Pengadaan Sapi Perah	Kel. Ika Puncak Sago	Kelompok	2 Kelompok	800,000,000
		Ke. Sago Pratama			
Pengembangan populasi sapi potong	Pengadaan Sapi Potong	Kel. Ingin Maju	Kelompok	5 kelompok	1,475,000,000
		Kel. Tunas Harapan			
		Kel. Salingka Bukik			
		Kel. Mekar Sari			



1	2	3	4	5	6
		Kel. Andes Legusa II			
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter Peralatan Puskesmas	Pengadaan Vaksin	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	25,000,000
Penguatan Puskesmas	Pengadaan Insanator dan Peralatan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	300,000,000
	Pengadaan obat-obatan dan biaya operasional	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	500,000,000
Pengendalian dan penanggulangan Rabies	Pengadaan vaksin rabies, peralatan dan operasional	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	1,275,000,000
Biosekuriti Perunggasan	Pengadaan Desinfektan dan biaya operasional	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	120,000,000
Pengendalian dan penanggulangan jembrana	Pengadaan Vaksin dan operasional	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	18,500,000
Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada sapi dan kerbau	Pemeriksaan, pengobatan dan monitoring	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	70,000,000
Fasilitas Ambulatoir (kendaraan) pengawas kesmavet	Pengadaan mobil pengawasan kesmavet	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	750,000,000
Fasilitasi peningkatan mutu produk olahan	Pengadaan peralatan untuk pengolahan dan study komperatif	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	150,000,000



1	2	3	4	5	6
Fasilitasi sarana unit pemasaran hasil peternakan	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pemasaran hasil peternakan (kios peternakan (kios daging higienis dll))	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	400,000,000
Fasilitasi pengolahan pangan ternak ruminansia	Peningkatan SDM Pengolah Hsl dan peralatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	300,000,000
Penataan Pemotongan Hewan Kurban	Pengadaan sarana prasarana pemotongan hewan yang ASUH dan higienis	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	1,500,000,000
Fasilitasi Pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair	Pengadaan sarana prasarana pengolahan biogas	Kel. Sago Pratama	Kelompok	1 Kelompok	250,000,000
Asuransi Usaha Ternak Sapi AUTS	Pemberian Asuransi Ternak	Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Keswan	13 Kecamatan	80,000,000
Penguatan pakan induk sapi potong	Pengadaan bibit pakan dan sarana lainnya	Kel. Sakinah	Kelompok	4 Kelompok	1,400,000,000
		Kel. Batu Susu			
		Kel. Putri Mekar			
		Kel. Subur Halabeh			
Pengembangan Integrasi sapi-tanaman pangan	Pengadaan Ternak Sapi	Kel. Sago Jaya	Kelompok	3 Kelompok	1,200,000,000
		Kel. Pertiwi			
		Kel. Ingin Maju			
Pengembangan Integrasi Sapi Kakao	Pengadaan Ternak Sapi	Kel. Bungo Matahari	Kelompok	3 Kelompok	1,200,000,000

1	2	3	4	5	6
		Kel. Tunas Baru			
		Kel. Padang Sukses			
	Pengadaan Ternak Itik	KWT maju Bersama	Kelompok	1 Kelompok	200,000,000
	Pengadaan Ternak Kambing	Kel. SAHATI	Kelompok	1 Kelompok	200,000,000
	Pengadaan Ternak Kerbau	Kel. KWT Padat Karya	Kelompok	1 Kelompok	295,000,000
	Pengadaan Ternak Puyuh	Kharisma Indonesia Terpadu	Kelompok	1 Kelompok	100,000,000
	<b>JUMLAH</b>				<b>13,008,500,000</b>

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Nasional tahun 2018 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan RKP tahun 2018, memuat tema RKP tahun 2018 adalah **"Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah"**



Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan fakta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia;

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2018 ini antara lain :

1. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (**tusi**) harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas program yang nomenklatur nya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jarring, membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Holistik, Tematik, Terintegrasi dan Spasial.

- **Holistik – Tematik.** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, Kemen KLH, Kemen Perdagangan serta Pemerintah Daerah.
- **Integratif.** Pencapaian kedaulatan pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organic, pengendalian harga dan impor pangan dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- **Spasial.** Pembangunan sawah baru misalnya harus mempertimbangkan lokasi yang berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar dan lain-lain.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan iklim n

- investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
  8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
  9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
  10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappeda mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat program-program kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBD Kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan disajikan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati/Walikota.

## A. VISI DAN MISI

### 1. Pernyataan Visi

Visi Pembangunan Peternakan: **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra Produksi Peternakan yang tangguh di Sumatera Barat”**

### 2. Penjelasan Makna

Dalam visi ini terdapat tiga (3) kata kunci yaitu *Sentra produksi*, *peternakan* dan *Tangguh* yang memiliki makna sebagai berikut :

1. ***Sentra Produksi***, merupakan pusat atau centra dari hasil –hasil peternakan, baik berupa daging, telur, susu dan populasi ternak baik secara kualitas maupun kuantitas dsb.
2. ***Peternakan***, merupakan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
3. ***(Peternakan yang) Tangguh***, diartikan sebagai kegiatan peternakan yang telah menjadi komoditi usaha unggulan masyarakat yang mampu bersaing dengan komoditi usaha lain dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat serta memenuhi kebutuhan pangan gizi.



Berdasarkan 3 kata kunci tersebut diketahui bahwa kedepannya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertekad menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra produksi peternakan, baik itu temak unggas (ayam ras, buras ) berupa peningkatan produksi telur maupun peningkatan produksi daging bagi ayam pedaging, serta temak besar seperti sapi, maupun kerbau, yang mampu menghasilkan bibit-bibit unggul, meningkatkan produktifitas daging sehingga mendukung program nasional PSDS.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa Visi SKPD merupakan cita-cita SKPD yang realistis dengan telah mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki. Sehubungan dengan visi yang dicetuskan tersebut, maka pada tabel berikut terdapat beberapa potensi yang ada.

### 3. Pernyataan Misi

Sehubungan dengan visi di atas maka misi yang hendak dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama lima tahun ke depan adalah dengan penekanan kepada *peningkatan produksi peternakan ke depan*. Adapun misi-misi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja kelembagaan, aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta sarana penunjang pembangunan peternakan
2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha peternakan, penyediaan data informasi dan teknologi peternakan
3. Mencegah dan mengendalikan penyakit hewan menular.
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan untuk meningkatkan produksi peternakan
5. Meningkatkan agribisnis peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Penjelasan kelima misi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maksudnya adalah peningkatan kinerja pelayanan publik dalam menumbuhkembangkan organisasi kelompok peternak baik di daerah sentra peternakan maupun diluar daerah sentra peternakan, sarana prasarana penunjang pembangunan peternakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dinas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha peternakan, penyediaan data, informasi dan teknologi peternakan maksudnya adalah meningkatkan kemampuan pelaku usaha peternakan baik perorangan maupun kelompok sehingga diperoleh usaha yang produktif, efisien dan efektif, serta tersedianya data dan informasi peternakan yang akuntabel sebagai bahan perencanaan dan evaluasi, selanjutnya terolah dan terserapnya teknologi peternakan yang tepat guna.
3. Mencegah dan mengendalikan penyakit hewan menular maksudnya adalah mengantisipasi berkembangnya penyakit ternak baik yang menular maupun penyakit ternak yang tidak menular baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah.
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan untuk meningkatkan produksi peternakan maksudnya adalah pengembangan kawasan sentra peternakan yang dikembangkan sesuai dengan rancangan tata ruang dan disesuaikan dengan daya dukung lahan yang ditunjang ketersediaan sarana produksi peternakan (sapronek) sehingga produksi ternak dapat ditingkatkan, dan berkembangnya sentra produksi ternak besar, ternak unggas dan ternak kecil.
5. Meningkatkan agribisnis peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan maksudnya adalah menumbuhkembangkan usaha peternakan maupun produk olahan hasil peternakan unggul dan bersaing di pasar dengan menjaga lingkungan usaha dari dampak pencemaran lingkungan.

Berdasarkan misi-misi di atas, maka upaya awal yang perlu dilakukan dalam pencapaian visi adalah menyamakan dan mengerahkan semua energi / sumber daya untuk meningkatkan produksi peternakan. Setelah adanya kesamaan persepsi maka potensi keberhasilan pencapaian visi lebih besar, karena merupakan komitmen bersama dalam suatu organisasi.

Sesuai dengan peran, lingkungan Strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Misi pembangunan peternakan dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur jajaran Peternakan maupun pelaku pembangunan.
2. Memfasilitasi sarana pendukung pembangunan peternakan.
3. Mencegah dan mengendalikan penyakit hewan/ternak.
4. Mengamankan konsumen terhadap bahan pangan asal ternak.
5. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan produktifitas ternak
6. Memfasilitasi, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan dan produk olahan hasil peternakan.



7. Mengawasi dan mengontrol keluar masuknya ternak dan produk hasil ternak ke dan dari Kabupaten Lima Puluh Kota

## B. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Tujuan

Bertolak dari misi yang ditetapkan di atas, maka **tujuan** yang ingin dicapai dan diwujudkan pada akhir pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

1. Terlaksananya kinerja aparatur dan tersedianya sarana penunjang pembangunan peternakan.
2. Tercapainya peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan dan tersedianya data, informasi yang akurat dan akuntabel serta terlaksananya teknologi peternakan .
3. Terhindarnya Kabupaten Lima Puluh Kota dari penyakit hewan menular
4. Terwujudnya kawasan sentra produksi peternakan
5. Terlaksananya agribisnis peternakan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

*Misi 1 : Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sarana Penunjang Pembangunan Peternakan;*



a. Strategi

1. Mengembangkan dan membina serta memberdayakan struktur organisasi Dinas dan UPTD
2. Meningkatkan penyediaan dan kualitas regulasi
3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Dinas
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, baik untuk Dinas maupun untuk pembangunan peternakan
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Dinas Peternakan Provinsi dan Kementerian Pertanian

b. Kebijakan

1. Menyusun struktur organisasi yang profesional dan akuntabel
2. Mengembangkan mekanisme kontrol/pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan program dan anggaran
3. Melaksanakan penataan dan kualitas pelayanan publik
4. Melakukan penataan asset dan barang habis pakai agar pemanfaatannya berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan kualitas dan sistem rekrutmen aparatur
6. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur melalui Diklat penjenjangan dan Diklat Fungsional/Bimbingan Teknis

*Misi 2 : Meningkatkan kapasitas pelaku usaha peternakan, penyediaan data dan informasi serta teknologi peternakan*

a. Strategi

1. Menyusun standar/kriteria pembentukan kelembagaan usaha peternakan
2. Melakukan survey untuk updating data dan informasi peternakan
3. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
4. Melakukan desiminasi teknologi peternakan tepat guna kepada kelompok tani ternak/peternak

b. Kebijakan

1. Meningkatkan koordinasi tentang pembinaan kelembagaan dengan instansi terkait seperti BP4K, Distanhorbun,dll

2. Updating data dan informasi peternakan setiap tahun
3. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak terkait perihal pemanfaatan dan desiminasi teknologi peternakan tepat guna serta penyediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna
4. Mendorong pelaku agribisnis peternakan melalui optimasi kawasan

*Misi 3 : Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular*

a. Strategi

1. - Mengembangkan surveylance
2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan/ternak
3. Menyusun rencana program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular
4. Mengembangkan program biosecurity
5. Mengembangkan sistim pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan
6. Mengembangkan sistim informasi kesehatan hewan
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyakit dan bahaya penyakit hewan menular.

b. Kebijakan

1. Pencegahan pemberantasan penyakit hewan
2. Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
3. Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan
4. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dalam mencegah dan memberantas penyakit hewan menular
5. Mengaktifkan fungsi chek point dalam rangka mengawasi lalu lintas ternak /hewan
6. Mengembangkan dan membangun sanitasi yang layak bagi masyarakat peternak

*Misi 4 : Mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan untuk meningkatkan hasil produksi peternakan*

- a. Strategi
  1. Mendorong peningkatan kualitas mutu genetic ternak
  2. Mendorong peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak
  3. Pengawasan bibit ternak dan mutu pakan ternak yang digunakan pelaku usaha peternakan
  4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber bahan pakan lokal untuk menunjang pembudidayaan ternak
  5. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan yang diarahkan kepada kesesuaian komoditi dan lokasi
  6. Mengawasi dan mengendalikan pemotongan ternak betina produktif

b. Kebijakan

1. Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ternak dan meningkatkan pelayanan kepada peternak dan pelaku usaha peternakan
2. Meningkatkan monitoring, evaluasi serta supervise terhadap bibit ternak yang ada pelaksanaan kawasan ternak.
3. Melaksanakan penelitian, pengolahan dan kaji terap untuk pemanfaatan sumber daya lokal yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam peningkatan populasi dan produktifitas ternak, seperti dengan BIB Tuah Sakato, BPTU-SP dan pihak terkait lainnya.
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dengan pihak terkait dalam hal pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif.

*Misi 5 : Meningkatkan agribisnis peternakan yang berdaya saing dan berwawasan Lingkungan*

a. Strategi

1. Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Peternak, kelompok dan pelaku pengolah hasil melalui pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peternakan dan hasil olahan peternakan



3. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada kelompok/peternak/pelaku pengolah hasil untuk memperoleh akses permodalan yang bersumber dari pemerintah dan per-bank
4. Pengembangan jaringan kerjasama dan promosi hasil produksi peternakan
5. Meningkatkan fasilitas pasar produksi hasil peternakan dan outlet pemasaran produk olahan hasil peternakan
6. Menyediakan biaya operasional pasar produksi peternakan dan produk olahan hasil peternakan

b. Kebijakan

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemberian rekomendasi izin usaha dan permodalan bagi pelaku agribisnis peternakan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengembangan kemitraan inti dan plasma.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk peningkatkan produksi dan promosi produk peternakan
4. Memfasilitasi pertemuan antara pelaku agribisnis peternakan secara berkala dan menjalin kerjasama secara profesional
5. Meningkatkan pembangunan dan perawatan sarana prasarana pasar produksi peternakan dan outlet produk olahan hasil peternakan
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan izin usaha peternakan, pemanfaatan dana oleh pelaku agribisnis yang telah di fasilitasi serta peningkatan mutu dan pemasaran produk olahan hasil peternakan

### 3. Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan

Program pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program pembangunan peternakan disusun dengan mengacu kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun 2011 - 2015

4. Rencana Strategis Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015
5. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2015
6. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 – 2015

#### **Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mengacu dan mempedomani Visi dan Misi Bupati, adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

**” Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ”Yang Mantap”  
Berlandaskan Iman dan Taqwa”**

Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan taraf / kualitas hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri serta gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jompo. Bank Tanah Nagari, Usaha ekonomi Produktif pemuda.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, Mesjid, MDA, TPA/TPSA dan Pondok Pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka mengharumkan nama daerah.

4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi seutuhnya dan Jaminan Penjejjangan Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat.
6. Peningkatan Pembangunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensial lokal.
7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribatan dan kerukunan antar umat beragama.
8. Mewujudkan keberadaan kota sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan infrastruktur dan perangkat lunak.
9. Menghadirkan pengakuan, penghargaan dan kompensasi terhadap kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah berbasis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak nagari mempunyai andil dan jasa di Republik ini. Mengembalikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, beragama maupun kedaulatan adat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Adapun isu-isu penting yang ada di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.
2. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan temak yang terjangkit endemic, pengawasan perdagangan temak antar daerah.
3. Peningkatan produksi hasil peternakan. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Kegiatan Pembibitan



dan perawatan ternak, Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.

4. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

Adapun program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang di RENSTRA adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Misi pada RPJM	Prog ke
<p><b>I. Program Pelayanan administrasi perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Penyediaan Alat Tulis</li> <li>6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan</li> <li>7. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah</li> </ol>	Mewujudkan reformasi birokrasi seutuhnya dan jaminan penjejangn karir dan kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan pekerja social masyarakat. <b>(misi 5)</b>	
<p><b>II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>2. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</li> <li>3. Pengadaan mobil jabatan</li> </ol>	Sda	
<p><b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.</li> <li>2. Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu</li> </ol>	Sda	
<p><b>IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan formal</li> </ol>	Sda	

<p><b>V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b></p> <p>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p>	<p>Sda</p>	
<p><b>VI. Program peningkatan kesejahteraan petani</b></p> <p>1. Peningkatan kemampuan lembaga petani</p>	<p>Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <b>(misi 1)</b> dan Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui gerakan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, ketahanan energy, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM gerakan usaha dini mandiri serta gerakan pemberdayaan perempuan, gerakan sayang jompo. Bank tanah nagari, usaha ekonomi produktif pemuda. <b>(misi2)</b></p>	<p>1</p>
<p><b>VII. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah</b></p> <p>1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah</p>	<p>Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya,</p>	<p>Prog 1</p>

	dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <b>(misi 1)</b>	
<p><b>VIII. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan masalah</li> <li>2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak</li> <li>3. Pemusnahan tenak yang terjangkit endemik</li> <li>4. Pengawasan perdagangan tenak antar daerah.</li> </ol>	<p>Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <b>(misi 1)</b> dan Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu serta meningkatkan pemberdayaan surau masjid, TPA/TPSA dan produk pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumberdaya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu berprestasi, atlet dan mereka yang mengharumkan nama daerah <b>(misi 3)</b> dan Peningkatan pelayanan public dan penciptan iklim investasi yang disukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata</p>	<p>Prog 3 dan 4</p>



	kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) (misi 4)	
<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b> 1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2. Pembibitan dan perawatan ternak 3. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 4. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 5. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Misi 1 dan Misi 2	Prog 2 dan Prog 3
<b>X. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b> 1. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 2. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/ internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer 3. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan. 4. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/ promosi atas hasil produksi peternakan 5. Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase / eksebis/ promosi atas hasil produksi peternakan 6. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 7. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 8. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat 9. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Misi 1 dan misi 2	Prog 2,3 dan 4

10. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 11. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan 12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan		
<b><i>XI. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</i></b> 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Misi 1	Prog 3

Berdasarkan program dan kegiatan diatas maka untuk tahun 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupten Lima Puluh Kota melaksanakan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 secara lengkap dapat dibaca ditabel berikut :

## PENUTUP

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan maka seluruh SKPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Disnak dan Keswan (Renja Disnak dan Keswan) tahun 2018. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2018, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2018 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : Maret 2017

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Ir. PRIYADI BUDIMAN**